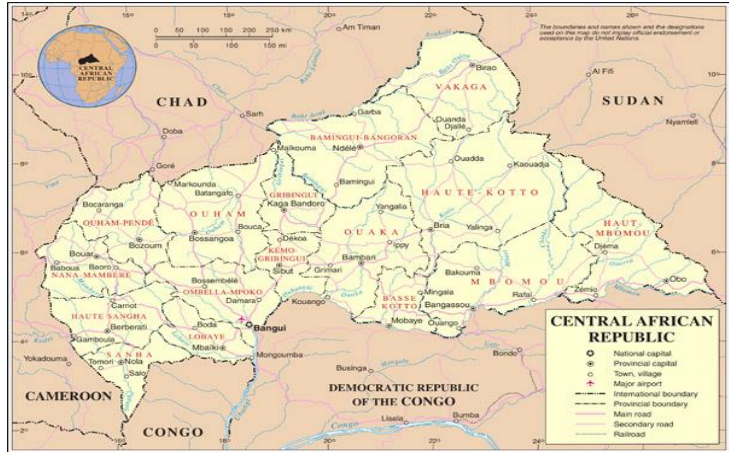


## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik umum terjadi di berbagai ruang lingkup salah satunya di dalam suatu negara. Masyarakat atau pemerintah di dalam negara terdiri dari individu – individu yang memiliki sifat dasar skeptis terhadap individu lain sehingga memicu kecemburuan sosial, dan rasa saling tidak percaya. Munculnya konflik juga tidak dapat diprediksi, terjadi pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan (Soekanto, 2007). Ada beberapa penyebab terjadinya konflik seperti suatu subjek melawan sebuah tindakan yang tidak sejenis dengan pemikirannya, suatu kelompok mendapatkan keuntungan lebih sedangkan kelompok-kelompok lain yang bersinggungan merasa rugi, dan perbedaan kecenderungan perilaku antar pihak (Rahim, 2002). Di tingkat eskalasi konflik tertentu dapat memicu peperangan yang ekstrim hingga membahayakan aktor dan non-aktor dalam konflik tersebut.

Konflik di salah satu wilayah Timur Tengah yaitu *Central African Republic* (CAR) dapat dibidang konflik yang tenggelam oleh isu-isu konflik negara lain dan juga sebagai negara yang terlewatkan (Permesti, 2014). Tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Afrika lainnya, kemiskinan dan instabilitas politik membebani CAR dari tahun 1960. Letak geografis negara ini pun relatif tidak menguntungkan, hal ini disebabkan oleh lokasi negara yang tidak bersentuhan dengan laut atau disebut *Landlock State*. Negara ini berbatasan langsung dengan Kongo di selatan, sebelah timur ada Sudan, bagian utara terdapat Chad, dan Kamerun di sisi barat (Djafar, 2012).



Gambar 1.1 Peta Administratif Republik Afrika Tengah

Sumber: <http://www.vidiani.com/detailed-political-and-administrative-map-of-central-african-republic-with-all-cities-and-airports/print>

Meskipun telah meraih kemerdekaan dari Prancis di tahun 1960, konflik terus bermunculan di negara ini. Pada saat pergantian kepemimpinan hampir di setiap transisinya diinisiasi kudeta. Contohnya ketika Presiden David Dacko mencoba membuat rezim partai tunggal untuk memperkuat keberlangsungan pemerintahannya. Kepemimpinan Dacko dikudeta oleh Jendral Jean B Bokassa dan tahta kepresidenan pindah ke tangan Bokassa. Tidak sampai di tangan Bokassa saja, kepemimpinan Republik Afrika Tengah kemudian bergilir lagi ke David Dacko, dilanjutkan oleh Andre Kolingba, Ange Felix-Patasse, sampai di Francois Bozize pemberontakan semakin menjadi-jadi.

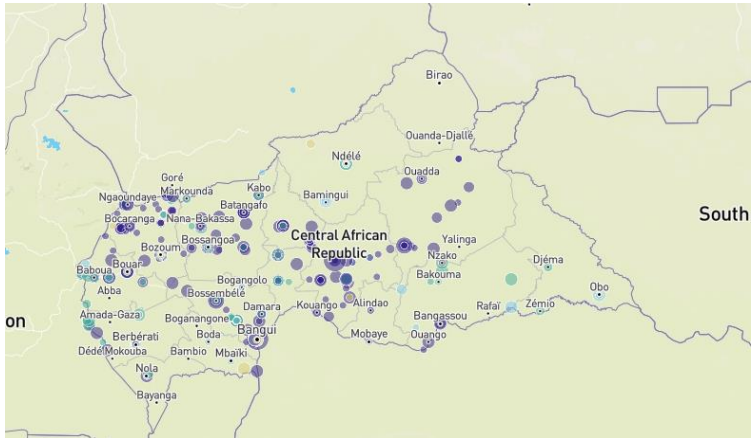
Kinerja kepemimpinan Francois Bozize di awal periode hingga akhir jabatannya dianggap tidak pernah memprioritaskan perkembangan nasional dan tata laksana pemerintahan yang baik atau sering disebut sebagai *Good*

*Governance* (GlobalSecurity, 2017). Respon agresif terhadap pemerintah oleh sekelompok oposisi muncul merespon ketidaksesuaian itu. Persatuan Pasukan Demokratik untuk Persatuan (UFDR), Konvensi Patriot untuk Keadilan dan Perdamaian (CPJP), dan Konvensi Patriotik untuk Menyelamatkan Negara (CPSK) hadir bertindak melawan pemerintah menuntut hak-hak masyarakat. Di tahun 2007, pemerintah mengupayakan rekonsiliasi dengan dua kelompok oposisi tersebut untuk segera menunaikan kewajibannya sebagai pemerintah dengan disepakatinya perjanjian damai Birao (Eberhard, 2014).

Hasil dari perjanjian Birao setelah diamati satu tahun masih belum menunjukkan perubahan menurut kelompok oposisi lain seperti *Armee Populaire pour la Restauration de la Democratie* atau Tentara Rakyat untuk Pemulihan Demokrasi (APRD) dan FDPC hingga mereka mendesak ulang pemerintah untuk melakukan kesepakatan damai di tahun 2008 dengan nama perjanjian Libreville yang berisi pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR), ditambah dengan pembagian kekuasaan politik untuk partai-partai lain. Alhasil, pemerintah Republik Afrika Tengah tetap tidak serius dalam menerapkan perjanjian Libreville. Oposisi-oposisi tidak tinggal diam melakukan manuver mereka kepada pemerintah sampai pada bulan Desember 2012 terbentuklah kelompok koalisi pemberontak baru bernama Seleka yang dipimpin oleh Michael Djotodia (Firman, 2017).

Setelah tahun 2012 koalisi pemberontak Seleka memulai aksinya dan mencoba merebut wilayah inti Republik Afrika Tengah yaitu Bangui yang merupakan Ibu Kota negara. Serangan demi serangan dilancarkan hingga Bozize berhasil dilengserkan di tahun 2013. Tidak hanya Bangui, tetapi daerah sekitarnya pun berhasil diambil alih. Secara sepihak Michael Djotodia sebagai penggerak pemberontak secara sepihak mengumumkan Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Afrika Tengah telah diganti oleh dirinya (Republika, 2015). Pemberontakan Seleka ini telah mengarah pada Genosida,

segala tindakan kekerasan telah sampai ke titik keresahan rakyat sipil Republik Afrika Tengah yang mayoritas umat kristiani. Dengan desakan pemberontak ini munculah milisi perlawanan dari kubu kristiani dengan menamakan dirinya Anti-Balaka (Haryanto, 2017).



*Gambar 1.2 Peta Konflik Republik Afrika Tengah (Konfrontasi Seleka Anti-Balaka, dan Operasi Militer Dewan Keamanan PBB)*

*Sumber:*

*<http://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/car/v2/#5.168084284143305/26.35123864911816/5/4/1/2.6s>*

Konflik antara kubu pemerintah dan oposisi yang kemudian beralih menjadi konflik agama antara Seleka dan Anti-Balaka di Republik Afrika Tengah ini semakin mengancam instabilitas keamanan benua Afrika dan Dunia Internasional. Kemunculan Anti-Balaka merupakan keresahan pribumi yang mayoritas non-muslim. Anti-Balaka merasa direnggut hak dalam pengelolaan sumber daya alam karena didominasi oleh kelompok Seleka. Jika kita perhatikan sejak kemerdekaannya hingga kini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Dewan Keamanan PBB memfokuskan isu-isu keamanan di beberapa daerah seperti timur tengah. Pada tahun 1998 Dewan Keamanan PBB telah memulai misi perdamaian di sana (UNSC, 1998).

Namun, setelah konflik mengalami eskalasi yang semakin tajam lebih tepatnya pasca perang Seleka dan Anti-Balaka meletus di tahun 2013 yang memakan 1.000 korban jiwa dan di tahun 2014 sampai memaksa sekitar satu juta orang meninggalkan rumah mereka (Rimanews, 2014). Dewan Keamanan PBB melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Organisasi Internasional yang dipercaya mengatasi isu perdamaian dan keamanan, memperbaiki keadaan dengan resolusi perdamaian yang disepakati bersama oleh anggota organisasi tersebut.

PBB berperan penting dalam penanganan konflik dan menegakkan perdamaian. Sesuai dengan *main goals* pembentukan PBB yaitu merawat perdamaian serta keamanan internasional. Untuk menciptakan hal tersebut, DK PBB mencegah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian dengan langkah-langkah damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Ananda, 2015). Dengan resolusi-resolusi yang dibuat Dewan Keamanan PBB mempermudah negara-negara anggota PBB dan Organisasi Internasional lain dalam mengupayakan misi perdamaian di Republik Afrika Tengah.

Sebagai resolusi yang ditetapkan untuk menanggulangi konflik internal di Republik Afrika Tengah, DK PBB menerapkan resolusi nomor 2127. Berbagai cara resolusi konflik tertuang dalam resolusi nomor 2127 yang kemudian akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Penulis memutuskan mengambil judul “DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2127 TERHADAP KONFLIK INTERNAL REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012 – 2016”.

## **B. Batasan Penulisan dan Rumusan Masalah**

Penulis fokus pada dampak resolusi DK PBB nomor 2127 yang disahkan pada tahun 2013, terhadap konflik di Republik Afrika Tengah dengan batasan tahun 2012-2016 dalam pertengahan periode kepemimpinan Francois Bozize sampai terpilihnya Faustin A Touadera. Berdasarkan batasan yang ada maka rumusan masalah yang diambil ialah :

1. Bagaimana Dampak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2127 Dalam Penanganan Konflik Internal di Republik Afrika Tengah di Tahun 2012-2016?

## **C. Tujuan Penelitian Skripsi**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ditujukan untuk :

- a. Untuk memaparkan dinamika konflik di *Central African Republic*.
- b. Untuk menjelaskan dampak resolusi nomor 2127 DK PBB ketika menangani konflik di *Central African Republic*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu :

- a. Membagi pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat dalam atau luar negeri baik tenaga pengajar Hubungan Internasional maupun mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang dinamika konflik internal *Central African Republic* serta dampak dari resolusi DK PBB nomor 2127 dalam kasus tersebut,

semoga mampu dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Menjadi materi komparasi aktor – aktor hubungan internasional mulai dari subjek individu, kelompok, negara, sampai organisasi internasional ketika ingin menangani konflik internal di negara-negara tertentu.
- c. Menyajikan validitas data yang baik tentang pemetaan konflik internal di salah satu wilayah negara-negara Afrika.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka konsep untuk dijadikan landasan penelitian yang jelas yakni konsep Organisasi Internasional dan konsep Resolusi Konflik. Penjabarannya sebagai berikut :

##### **1. Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudi dalam bukunya “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” sebagai berikut:

“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudi, 2009).

Kemudian Teuku May Rudi menambahkan bahwa Organisasi Internasional memiliki peran yang berdampak baik bagi masalah-masalah dunia internasional antara lain:

- a. Sebagai wadah yang bertujuan menjalin kerjasama dan untuk mengurangi peningkatan konflik antara anggota.
- b. Sebagai sarana kompromi untuk memperoleh *best decision* yang saling menguntungkan dan ada waktunya

bertindak sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan pelestarian alam, operasi militer, dan lain lain (Rudi, 2009).

Dalam sudut pandang Volker Rittberger dan Bernhard Zangl, berpendapat bahwa organisasi internasional memiliki tiga konsepsi yang berbeda yaitu:

- a. Sebagai instrumen, untuk meraih kepentingan organisasi internasional menjadi sarana berdialog bagi negara-negara anggotanya melalui proses politik di organisasi internasional.
- b. Sebagai arena, untuk berinteraksi antar negara anggota demi terciptanya suatu rumusan kebijakan bersama.
- c. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat menjadi aktor berbadan hukum yang mengingat negara-negara anggota telah bersepakat dan bersedia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada organisasi internasional (Rittberger & Zangl, 2006).

Organisasi Internasional ada dan diperlukan sampai sekarang karena mampu memberikan sebuah *framework* bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan dalam politik internasional seiring dengan tingkat interaksi di antara negara yang semakin intens berkat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi (Sugito, 2016). Berperan aktif dan bertanggung jawab menjalankan ketertiban dan perdamaian internasional merupakan tugas PBB. Organisasi Internasional dibutuhkan ketika suatu negara sudah tidak mampu menyelesaikan masalah – masalah yang berkembang. Dengan resolusi-resolusi yang dirumuskan dan disepakati bersama anggota, PBB membuktikan konsistensinya.

Di dalam Piagam PBB sendiri secara khusus menyebutkan bahwa resolusi yang dirumuskan oleh Dewan Keamanan bersifat mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu “*The Organization shall*



*ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*" (Suwardi, 2004). Berdasarkan pasal tersebut, yang tidak termasuk dalam keanggotaan PBB dan Dewan Keamanan PBB dapat dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, apalagi bagi negara yang merupakan pihak yang bersengketa atau telah mengganggu stabilitas keamanan internasional dan membahayakan perdamaian dunia menurut pengamatan bersama Dewan Keamanan PBB (Ananda, 2015).

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2127 dengan tegas menyetujui dan memerintahkan untuk melindungi *natural resources* dan *human rights*, bertanggung jawab dalam mengamankan distribusi dana bantuan (logistik, kesehatan, pelatihan pendidikan) dan meminta bantuan kepada *sub-regional organizations* untuk menyediakan dana bantuan tambahan, memberikan sanksi *arms embargo* terhadap rezim Bozize, Kelompok Seleka dan Kelompok Anti-Balaka seperti tidak boleh memberikan peralatan militer (*non lethal*) ataupun persediaan militer sekecil atau sesederhana apapun, mengizinkan melancarkan pasukan militer Prancis dan Afrika untuk mencegah pertumpahan darah yang meningkat di Republik Afrika Tengah.

## **2. Resolusi Konflik**

Resolusi Konflik menurut Muhadi Sugiono dan Mohan Nazala merupakan cara penyelesaian konflik dengan mengenali sumber-sumber utama asal muasal konflik dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi sumber-sumber tersebut (Sugiono & Nazala, 2011). Dalam menangani konflik tentu memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda, Johan Galtung ada tiga tahap dalam meredakan konflik yaitu, *Peacekeeping*, *Peacemaking*, *Peacebuilding* (Galtung, 1976).

*Peacekeeping* merupakan tahap dimana intervensi militer berupaya untuk menghentikan atau mengurangi tindak

kekerasan sebagai simbol penjaga perdamaian yang tidak memihak. Proses selanjutnya yaitu *Peacemaking* yang bertujuan memulihkan hubungan persahabatan sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui negosiasi, arbitrase, mediasi terkhusus pada petinggi elit. Dan apabila telah masuk kedalam kondisi aman dan layak maka tahap terakhir *Peacebuilding* sebagai proses penerapan rekonstruksi sosial, politik, ekonomi demi mewujudkan perdamaian abadi. Dengan proses *peacebuilding* ditargetkan *negative peace* (tidak adanya kekerasan) berubah menjadi *positive peace* yang berarti seluruh lapisan masyarakat menikmati kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, keterwakilan politik yang efektif (Hermawan, 2007).

Dalam menganalisis lebih lanjut mengenai dampak resolusi Dewan Keamanan PBB pada penanganan konflik di Republik Afrika Tengah, penulis akan berfokus pada pendekatan *peacekeeping* dan *peacemaking*.

#### **a. Konsep Peacekeeping operation**

Tujuan dari *Peacekeeping* seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu sebagai penjaga perdamaian, yang berarti mampu menjaga dan menciptakan kondisi damai guna meminimalisir kematian warga sipil dan mengurangi risiko perang baru (United Nations). Berdasarkan rumusan resolusi konflik nomor 2127 *peacekeeping* di Republik Afrika Tengah memiliki definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Menghentikan atau mengurangi pemberontakan dan tindak kekerasan merupakan upaya penjaga perdamaian melalui program DDRRR (Disarmament, Demobilization, Repatriation, Reintegration, and Resettlement). Dalam konflik internal Republik Afrika Tengah antara kubu Seleka dan Anti-Balaka.
- b. Intervensi militer yang dilakukan dalam konflik Republik Afrika Tengah berupa *African-led International Support Mission (MISCA)* dan *UN Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic (BINUCA)* sebagai pasukan penjaga

perdamaian yang diamanahi untuk berkontribusi melindungi segenap warga sipil dari perlindungan yang tidak tepat, menstabilisasi kedaulatan negara termasuk seluruh perbatasan negara, dan menciptakan kondusifitas pada saat penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga yang membutuhkan.

- c. Penjaga perdamaian bersifat netral tidak memihak kepada siapa pun dalam tugas penyelesaian konflik.

## **b. Konsep Peacemaking**

Menurut artikel 33 Piagam PBB dalam situs resminya mengartikan *peacemaking* pendekatan lanjutan dengan mediasi dan negosiasi dengan dasar perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa. Dan untuk menghindari jalan buntu dalam prosesnya maka aktor-aktor yang bersengketa dapat memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga sebagai alternatif mediator dalam perundingan yang sedang dilakukan (UN, 2014). Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Proses penanganan konflik dari pihak-pihak yang terlibat langsung tidak mampu menyelesaikan sehingga pihak ketiga muncul dan memberi bantuan.
- b. Merekonsiliasi yang berarti mengatasi permusuhan dalam proses jangka panjang
- c. Mediasi yang berarti cara penyelesaian konflik dengan bantuan pihak lain yang berfungsi sebagai penengah.
- d. Negosiasi yang berarti cara menemukan titik temu dengan perundingan pihak-pihak berkonflik untuk mencapai kesepakatan terbaik dengan melibatkan pihak lain ataupun tidak.

*Peacekeeping dan Peacebuilding* dalam kasus konflik internal Republik Afrika Tengah merupakan suatu rangkaian cara untuk meminimalisir korban yang berjatuh disana. Operasi militer gabungan yang bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB lebih menekankan tindakan represif kepada

pemberontak Seleka guna mengurangi ancaman dan kekuatan dari pihak pemberontak yang kian memperkeruh situasi Republik Afrika Tengah. Tanpa melupakan cara-cara rekonsiliasi untuk meredakan tensi berdasarkan penerapan perjanjian-perjanjian seperti Birao dan Libreville.

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Dampak Resolusi Nomor 2127 Dewan Keamanan PBB berupa penurunan intensitas konflik internal sehingga mampu memberikan kesempatan munculnya demokratisasi di Republik Afrika Tengah pada tahun 2015 – 2016.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan gaya penelitian Deduktif - Analitik, yaitu jenis penelitian dengan memaparkan pola keadaan dan penggambaran fakta empirik beserta relevansi argumen yang bersifat deskripsi. Dan hasil yang berupa uraian dilanjutkan dengan metode analisis serta ditariklah kesimpulan analitik, yaitu dinamika konflik CAR dan dampak Resolusi nomor 2127 DK PBB dalam penanganan konflik internal CAR.

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kajian atau penelitian pustaka. Data-data yang diperoleh diambil dari berbagai sumber tulisan berbentuk artikel, jurnal, website, buku, berita online dan segala sumber data yang relevan dengan studi kasus penelitian.

### **3. Teknik Analisis Data**

Jenis analisis kualitatif digunakan penulis ketika menganalisis data – data pada karya ilmiah ini. Tanpa mengabaikan data – data kuantitatif yang bersifat angka atau grafik. Kemudian data kuantitatif tersebut dijadikan data pendukung analisis kualitatif. Dengan teknik ini penulis mencari dan menghubungkan data dan fakta yang relevan sehingga mampu membentuk argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **4. Metode Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dan pembaca penelitian ini maka metode penulisan deduktif menjadi pilihan penulis. Yang memiliki maksud untuk memaparkan fakta secara umum ke hal-hal khusus untuk membentuk kesimpulan yang mudah dipahami.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dirancang sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan.

### **BAB II DINAMIKA KONFLIK INTERNAL DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

Dalam bab ini mengulas tentang dinamika konflik yang terjadi dalam kurun waktu 2012 - 2016.

### **BAB III KETERLIBATAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN ISU KONFLIK INTERNAL**

Bab ini berisikan wewenang dan fungsi DK PBB dalam mengatasi isu konflik internal sebagai Organisasi Internasional yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

### **BAB IV PENINGKATAN KEAMANAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

Pada bab empat menjelaskan upaya DK PBB dan dampak yang muncul setelah resolusi tersebut disahkan dan diimplementasikan.

### **BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini penulis merangkum dan memberi kesimpulan penelitian secara menyeluruh beserta penjelasan yang telah di analisis.